

DOKUMEN

RBA TA. 2024

BPFK JAKARTA



BPFK JAKARTA
021-4240406
Jl. Percetakan Negara No.23 A Jakarta
Pusat - Indonesia
email :info@bpfkjakarta.or.id



@bpfk_jakarta



@bpfk.jkt



bpfkjakarta.or.id



081904240406

LEMBAR PENGESAHAN 1

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Subadri", is written over the stamp.

Subadri, ST.M.Si.

NIP. 197611122005011003

LEMBAR PENGESAHAN 2

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

PEJABAT PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM/

DIREKTUR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



dr. Aswan Usman, M.Kes
NIP. 197104042002121001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya sehingga Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dapat menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 2020–2024 yang disusun berdasarkan basis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima serta APBN. RBA merupakan peta rencana kerja dalam pembiayaan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan untuk membantu fungsi pengelolaan keuangan dan non keuangan secara efisiensi dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan, indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan kinerja pada tahun 2024 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Kami berharap RBA ini menjadi acuan dan pedoman kerja tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan visi misi Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2024.



Jakarta, 31 Desember 2022
Kepala Balai Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Jakarta,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Subadri', is written over the stamp.

Subadri, ST.M.Si.
NIP 197611122005011003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	2
LEMBAR PENGESAHAN 2	4
KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1. Umum	11
2. Visi dan Misi BLU	16
3. Gambaran Umum Kondisi BLU tahun 2024	17
4. Upaya BPFK Jakarta dalam mencapai Visi & Misi	17
5. Budaya Kerja Badan Layanan Umum	19
6. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Dewan Pengawas	21
BAB II. RENCANA KINERJA BPFK JAKARTA	26
1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2024	26
2. Rencana Kinerja BLU	29
3. Rencana Kinerja Keuangan	35
4. Informasi lainnya	47
BAB III. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Makro.....	8
Tabel 2 Asumsi Mikro	9
Tabel 3 Jenis Layanan BPFK Jakarta.....	13
Tabel 4 Perbandingan Tenaga teknis dan Administrasi BPFK Jakarta.....	18
Tabel 5 Rencana Pengembangan jumlah SDM BPFK.....	18
Tabel 6 Adapun asumsi makro untuk tahun 2024.....	26
Tabel 7 Analisa asumsi mikro di BPFK Jakarta	26
Tabel 8 Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 2023-2024	28
Tabel 9 Capaian Kinerja Layanan BPFK Jakarta 2022 - 2025	30
Tabel 10 Penambahan Jenis layanan BPFK Jakarta tahun 2023 - 2024	30
Tabel 11 Layanan Pelatihan Teknis di BPFK Jakarta tahun 2023 - 2024.....	33
Tabel 12 Capaian Indeks Kinerja Utama BPFK Jakarta Tahun 2022.....	34
Tabel 13 Capaian Indeks Kinerja Utama BPFK Jakarta Tahun 2023.....	35
Tabel 14 Capaian Pendapatan Layanan di BPFK Jakarta tahun 2022-2023 dan Prognosa tahun 2024 ..	36
Tabel 15 Rincian Belanja di Unit Kerja Layanan di BPFK Jakarta Tahun 2022 dan Prognosa Tahun 2023 - 2024	37
Tabel 16 Pendapatan Belanja Agregat.....	41
Tabel 17 Estimasi Saldo Akhir TA (n-1) dan Saldo Awal TA (n).....	42
Tabel 18 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja	43
Tabel 19 Prakiraan Maju Pendapatan dan belanja	46
Tabel 20 Rencana Kebutuhan RM	46
Tabel 21 Ambang Batas Belanja.....	47
Tabel 22 Layanan Inovasi BPFK Jakarta diluar tupoksi.....	48

GAMBAR

Gambar 1 struktur organisasi BPFK Jakarta.....	21
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta sebagai satker BLU diwajibkan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis BPFK Jakarta Tahun 2020 s.d 2024. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menerapkan visi “Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2024.

Kinerja BPFK Jakarta tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor/kondisi internal dan eksternal, salah satunya adalah berubahnya status pengelolaan keuangan dari satuan kerja PNBPN menjadi satuan kerja PPK-BLU. Perubahan status tersebut menyebabkan peningkatan jumlah kemampuan jenis layanan yang sangat mempengaruhi capaian target pendapatan BPFK Jakarta yang bersumber dari jasa layanan.

A. Kinerja Layanan

Gambaran realisasi pendapatan dan realisasi belanja BPFK Jakarta Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan pendapatan berdasarkan realisasi tahun anggaran 2022 sampai akhir Desember 2022 sebesar RpRp15.132.320.300,- dari target sebesar Rp9.000.000.000,- atau sebesar 168%.
2. Alokasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.324.903,- dengan realisasi sebesar Rp11.193.309.939,- atau sebesar 90,82%.
3. Alokasi Belanja Barang Tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.546.677.000,- dengan realisasi sebesar Rp13.894.889.685,- atau sebesar 89,37%.
4. Alokasi Belanja Modal Tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.485.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.376.168.116,- atau sebesar 97,56%.

Asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah :

Tabel 1 Asumsi Makro

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2024
1	Tingkat Inflasi	3,52 %
2	Tingkat Bunga Deposito	5 %

3	Nilai tukar rupiah / Kurs \$ 1	Rp15.198
4	Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR/LIBOR)	6,5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2023

Tabel 2 Asumsi Mikro

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Anggaran Remunerasi Pegawai	Sebesar 27 % dari total anggaran
2	Anggaran Biaya Operasional	Sebesar 26,8 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	Sebesar 40 % dari total anggaran
4	Tarif Pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan	Berdasarkan Unit Cost 100 %
5	Volume pelayanan	Meningkat sebesar 10%
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	Terpenuhi sebesar 100 %
7	Peralatan Ukur Standar	Berfungsi sebesar 80 %

1. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Dengan melihat perkembangan situasi terkini dan asumsi-asumsi yang dianggap dapat menentukan dan mempengaruhi kebutuhan anggaran serta pencapaian target pendapatan, maka ditetapkan Kebutuhan biaya BPFK Jakarta TA 2024 sebesar Rp 39.491.594.000,- terdiri dari PNB/BLU sebesar Rp22.191.566.000,- dan berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp17.300.028.000,- . Ambang batas yang diusulkan 10%,-. Secara umum sasaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini. Sasaran umum akan dicapai dengan strategi bisnis sebagai berikut : 1. Peningkatan kepuasan pelanggan, 2. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi, 3. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA, 4. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, 5. Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta, 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta, 7. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan, 8. Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal . Untuk meningkatkan pelayanan BPFK Jakarta sedang dalam proses pengembangan di beberapa sektor, yaitu: Penguatan Layanan BPFK Jakarta, Modernisasi IT dan Digitalisasi Proses Bisnis; Optimalisasi Aset Idle; Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan, Kerjasama Operasional dan Efisiensi

Anggaran (kekuatan : adanya factor beberapa regulasi yang mewajibkan fasyankes melakukan pengujian dan kalibrasi alkes.

BABI. PENDAHULUAN

1. Umum

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Awal tahun 2023, Kementerian Keuangan menerbitkan surat keputusan yang merubah status BPFK Jakarta menjadi satuan kerja BLU melalui Peraturan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023. BPFK Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta serta industri alat kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan menjalankan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- 3) Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- 5) Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- 6) Pengukuran luaran radiasi terapi;
- 7) Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi
- 8) Pengamanan fasilitas kesehatan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian,
- 10) Kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- 11) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- 13) Pengelolaan data dan sistem informasi;
- 14) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

Seluruh kegiatan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Untuk menjaga kesinambungan mutu alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan, kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta peralatan laboratorium yang

canggih merupakan tantangan yang mendorong institusi ini untuk mempertahankan komitmennya dalam melakukan usaha perbaikan yang berkesinambungan.

a. Landasan Hukum BPFK Jakarta

Pada tahun 1975 dibawah naungan Direktorat Instalasi Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI atas bantuan World Health Organisation (WHO) Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Perorangan mulai dilakukan yang pada saat itu bernama Film Badge Service. Pada tahun 1983/1984, nama Film Bdage Service sudah berubah menjadi Balai Pemeliharaan Peralatan Proteksi Radiasi dan Kalibrasi (BP3K) yang sudah menjadi embrio dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Tahun 1989/1990 BPF3K menempati gedung di Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Pusat, dengan jumlah pegawai dan peralatan yang semakin berkembang. Tahun 1993 BP3K dan berubah nama menjadi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dengan anggaran yang dikelola sendiri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1164/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan Jakarta, pelayanan kalibrasi alat kesehatan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 27 April 2007 Terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 terbit lagi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang melaksnakan tugas dibidang pengamana fasilitas kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Awal tahun 2023 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berubah status menjadi Satker PPK BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tanggal 16 Januari 2023. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2023 BPFK Jakarta mengajukan perubahan usulan tarif pelayanan di BPFK Jakarta pada Kementerian Keuangan agar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Landasan hukum Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

- 7) Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
- 8) PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 9) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

b. Layanan dan/atau karakteristik BPFK Jakarta

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta, dan memiliki tugas melakukan pengamanan fasilitas kesehatan di Indonesia melalui kegiatan, dan adapun jenis layanan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Jenis Layanan BPFK Jakarta

NO	LAYANAN	KETERANGAN	2022	2023	2024	2025
1	Pengujian dan Kalibrasi Alkes	(jml alat kesehatan)	23884	39690	41580	47520
2	Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi	(jml alat ukur standar)	720	864	1008	1152
3	Inspeksi Sarana dan Prasarana	(jml Instalasi)	165	595	655	720
4	Uji kesesuaian pesawat X	(jml alat kesehatan)	330	360	380	400
5	Pemantauan Dosis perseorangan	(jml unit)	4200	4466	4667	4826
6	Uji Produk	(jml alat kesehatan)	48	144	192	240
7	Pelatihan/Bimbingan teknis	(jml orang)	1	480	528	624
8	Uji Profisiensi	(jml alat kesehatan dan alat ukur)	120	160	180	240

Adapun penjelasan untuk setiap layanan di BPFK Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Sesuai Permenkes Nomor 54 tahun 2015 definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Jenis alat Kesehatan menurut salah satu badan riset kesehatan dunia *Emergency Care Research Institute* (ECRI) ada 600 jenis alat Kesehatan. BPFK Jakarta sampai dengan tahun 2022 sudah mampu melayani 143 jenis layanan dan 28 jenis layanan sudah terakreditasi. Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai. Pengertian laik pakai adalah alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik pakai artinya alat tersebut tidak aman dan memerlukan tindakan adjustment atau perbaikan. Peningkatan jumlah layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan tahun 2024 diharapkan tercapainya produktifitas dari setiap pelaksanaan dan adanya perjanjian kerjasama dengan rumah sakit vertikal di wilayah binaan BPFK Jakarta.

2) Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi

Instalasi Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard dan Alat Ukur Radiasi – Balai Pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan menjaga mutu dan ketertelusuran pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan. Dengan semakin bertambahnya kemampuan pelayanan BPFK Jakarta dalam hal pengujian dan kalibrasi alat kesehatan akan semakin bertambah pula kemampuan menjaga mutu dan ketertelusuran alat alat uji dan kalibrasinya. Dengan demikian harapan untuk semakin terjaganya mutu dan ketertelusuran kalibrasi alat kesehatan diseluruh Fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia akan semakin baik. Pengguna layanan kalibrasi alat ukur standar tidak hanya dari institusi penguji tetapi juga dari rumah sakit vertikal yang telah memiliki peralatan ukur standar yang digunakan untuk verifikasi internal. Institusi penguji juga memungkinkan datang dari negara-negara tetangga seperti yang sudah dilayani pada tahun 2023. Hal ini diperkuat dengan adanya kerjasama dengan ECRI Lembaga riset milik Amerika Serikat yang berkedudukan di Malaysia.

3) Inspeksi Sarana dan Prasarana

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit menjelaskan bahwa Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang menjadikan suatu bangunan rumah sakit berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana merujuk standar dan persyaratan yang berlaku.

4) Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian

Layanan proteksi radiasi dan uji kesesuaian adalah jenis pengujian alat kesehatan yang berkaitan dengan peralatan radiasi pengion dan *imaging*. Pengujian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun berdasarkan PERMENKES 54 Tahun 2015. Pengujian dilakukan untuk memastikan pesawat x-ray dan *imaging* di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional regulasi.

Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar- X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2018. Jenis layanan lain adalah pengukuran paparan radiasi. Pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa tingkat paparan pada fasilitas radiasi dalam keadaan memenuhi unsur keamanan dan keselamatan bagi pengguna, pasien dan masyarakat sekitar.

5) Pemantauan dosis perorangan

Evaluasi pemantauan dosis radiasi yang dipakai oleh pelaksana yang bekerja di lingkungan radiasi yang tidak terbatas pada sarana pelayanan kesehatan. BPFK Jakarta melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk thermoluminescent dosimeter (TLD) badge. Penggunaan TLD Badge untuk mengetahui besarnya Nilai Batas Dosis (NBD) radiasi yang diterima operator pesawat sinar X. Evaluasi pemantauan dilakukan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali.

6) Uji Produk Alat Kesehatan

Uji Produk alat kesehatan adalah kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan produk baru dan alat kesehatan inovasi (pengembangan) sebelum diproduksi dan dipasarkan. Hasil uji berkesesuaian dengan dokumen standard nasional ataupun internasional. Dengan semakin berkembangnya produk-produk inovasi alat kesehatan karya anak bangsa, pelayanan di Laboratorium Uji Produk mengalami peningkatan tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan hasil uji produk dapat digunakan untuk lampiran persyaratan dikeluarkannya nomor ijin edar alat Kesehatan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. Produsen yang telah mendapatkan ijin edar baru dapat memasarkan produknya di Indonesia. Lab Uji Produk yang telah terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujian oleh Komite Akredias Nasional (KAN). Tahun 2022 kemampuan layanan uji produk ada 46 jenis alat.

7) **Kemitraan dan Bimbingan Teknis**

Layanan ini terbagi atas dua sub layanan, yang pertama terkait dengan jejaring kemitraan seperti pembuatan nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan stakeholder BPFK Jakarta dalam rangka percepatan dan akselerasi layanan pengamanan fasilitas kesehatan. Ruang lingkup kerjasama dapat berupa penelitian, konsultasi, praktek / magang dan bimbingan teknis, atau BPFK Jakarta menerima pengampunan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan rumah sakit rujukan sekaligus rumah sakit pendidikan sesuai dengan Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Sub layanan kedua adalah Bimbingan Teknis, yakni sesuai dengan misi BPFK Jakarta memberikan pelayanan peningkatan kompetensi personil dibidang pengamanan fasilitas kesehatan, salahsatunya Penelitiam, PKL dan Magang.

8) **Penyelenggara Uji Profisiensi**

Program Uji Profisiensi (uji banding antar laboratorium) adalah suatu program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya.

Manfaat Keikutsertaan dalam Uji Profisiensi :

- a. Membantu laboratorium peserta Uji Profisiensi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengujian (dalam metode, peralatan dan pelaksanaan pengujian), serta menemukan penyebab dan cara perbaikan / koreksinya.
- b. Sebagai sarana jaminan mutu hasil pengujian
- c. Pemenuhan persyaratan KAN:
 - Bagi laboratorium yang sudah terakreditasi
 - Bagi laboratorium yang akan mengajukan akreditasi
- d. Masukan bagi KAN:
 - Untuk memantau kinerja/ kemampuan/ kompetensi teknis laboratorium
 - Bahan pertimbangan dalam pemberian akreditasi.

2. **Visi dan Misi BLU**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPFK Jakarta telah menetapkan visi sebagai petunjuk arah dalam kegiatan rutusnya. Adapun visi BPFK Jakarta adalah **“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”**. Rencana jangka Panjang BPFK Jakarta yang dituangkan dalam visi ini ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi pelayanan kalibrasi di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut di atas, BPFK Jakarta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;
3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

3. Gambaran Umum Kondisi BLU tahun 2024

Dengan pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU), Proyeksi Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan pada tahun 2024 diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa Pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan maupun usaha lainnya. Pengelolaan operasional mengacu pada rencana strategis bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan perimbangan penerimaan dan biaya operasional. Jenis layanan direncanakan, dipersiapkan untuk jenis layanan sesuai tupoksi, dan jenis layanan inovasi diluar tupoksi dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif, efisien serta akuntabel.

Peningkatan jenis layanan pada tahun 2024 dari kualitas dan kuantitas, direncanakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki saat ini. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jenis layanan:

- 1) Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- 2) Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- 3) Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- 4) Penambahan ruang lingkup layanan sebagai provider Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- 5) Inovasi layanan diluar tupoksi (Pelatihan teknis, Lembaga sertifikasi Produk, Tempat Uji Kompetensi dan lain-lain)

4. Upaya BPFK Jakarta dalam mencapai Visi & Misi

Upaya yang dilakukan untuk dapat menjalankan strategi dan sasaran dalam mencapai visi dan misi BPFK Jakarta adalah dengan membuat program yang lebih rinci, realistis dan relevan dengan tujuan pengembangan layanan BPFK Jakarta pada tahun 2024. Perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas sesuai dengan 9 (Sembilan) provinsi wilayah binaan BPFK Jakarta, Hal tersebut merupakan tantangan dan peluang yang potensial untuk meningkatkan pendapatan BPFK Jakarta. Untuk mencapai peningkatan mutu layanan BPFK Jakarta sesuai visi dan misi, maka dilakukan program startegis dibawah ini :

- 1) Mewujudkan kepuasan pelanggan
- 2) Meningkatkan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi
- 3) Meningkatkan ketercapaian standar pelayanan minimum
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana BPFK Jakarta

- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta
- 6) Meningkatkan pendapatan melalui produktifitas pelayanan
- 7) Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel

Program pengembangan lainnya yang disiapkan untuk tahun 2024 diantaranya berupa pengembangan sarana prasarana yang telah dilaksanakan mulai tahun 2022 meliputi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (**SIMPEL**) yang terintegrasi ke Balai Sertifikasi Elektronik (**BSRE**) dan Aplikasi Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan (**ASPAK**). Selain itu dikembangkan Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**) dan Sistem Informasi Pelaporan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (**SIPEKA**) yang berfungsi sebagai sarana memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Dan untuk meningkatkan kinerja pegawai telah dimiliki Sistem Informasi Absensi dan Pegawai (**SIAP**).

Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan, diantaranya kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dsistributor Alat Kesehatan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga teknisnya untuk dapat melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang nantinya dapat melakukan pengujian kalibrasi yang secara langsung dibimbing dan diawasi oleh BPFK Jakarta. Kegiatan ini memberikan pendapatan dari pengujian kalibrasi alat kesehatan bagi BPFK Jakarta. Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 110 Pegawai pada tahun 2023 yang terdiri dari :

Tabel 4 Perbandingan Tenaga teknis dan Administrasi BPFK Jakarta

Jabatan	2023	2024
Administrasi	31	31
Struktural	2	2
Teknis	82	82
Jumlah	115	115
Rasio		
Administrasi	27%	27%
Teknis	73%	73%

Pengembangan kompetensi SDM BPFK Jakarta juga direncanakan untuk mendukung layanan yang telah diprioritaskan. Adapun rencana pengembangan SDM BPFK Jakarta tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rencana Pengembangan jumlah SDM BPFK

No	Uraian	2023	2024
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan	1	1
2	Kepala Sub bag Administrasi dan Umum	1	1
	Sub bag Administrasi dan Umum		

	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	24	24
	Jenis tenaga Teknis	4	4
3	Kelompok substansi Tata Operasional		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	2	2
	Jenis tenaga Teknis	7	7
4	Kelompok substansi Pelayanan teknis		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	4	4
	Jenis tenaga Teknis	4	4
	Kelompok substansi Bimbingan Teknis		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	1	1
	Jenis tenaga Teknis	2	2
5	Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	16	16
5	Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Standar, Radiasi dan Kalibrator Alat Kesehatan		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6
6	Instalasi Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	32	32
7	Instalasi Uji Produk		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	5	5
8	Instalasi Pengujian Sarana Prasarana/Lembaga Inspeksi		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6
9	UPF PFK Palembang		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	0	0
	Jumlah total Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	31	31
	Jumlah total Jenis tenaga Teknis	79	79
		115	115

5. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

Presiden R.I. Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, dalam rangka momentum percepatan transformasi ASN telah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi core values ASN di NKRI, yang disebut dengan BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Panduan perilaku core values BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

1) Berorientasi Pelayanan :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2) Akuntabel :

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5) Loyal :

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara;
- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara.

6) Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
- Bertindak proaktif.

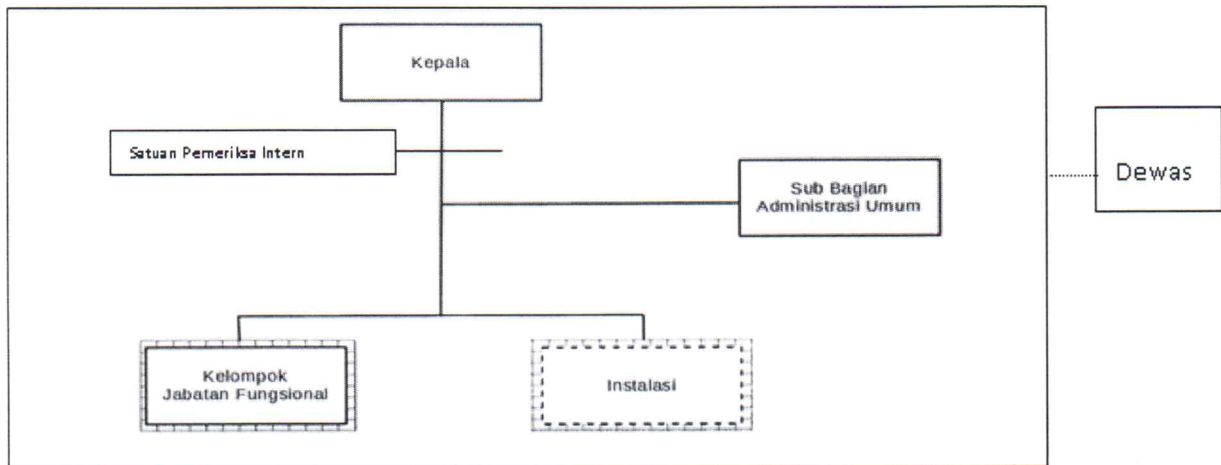
7) Kolaboratif :

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Panduan perilaku BerAKHLAK dengan motto “bangga melayani bangsa” ini memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional di BPFK Jakarta, sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah, memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta memudahkan birokrasi lebih lincah dan inovatif.

6. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Dewan Pengawas

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, struktur organisasi BPFK Jakarta sebagai berikut:



Gambar 1 struktur organisasi BPFK Jakarta

Kepala BPFK Jakarta : Subadri, ST, M.Si

Kepala Sub Bagian Administrai Umum : dr. Bayu Aji Kelana

a. Susunan Pejabat Pengelola BPFK Jakarta :

1) Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta :

- Subadri, ST.M.Si.

2) Pejabat Keuangan :

- dr. Bayu Aji Kelana

3) Pejabat Teknis :

- Dodi Giantara, ST
- Samburi, ST. MSi.
- Dessy Yulianti, ST
- Syahrul Muhammadiyah, ST, MT.
- Marlina Harahap, ST
- Febriyanto Hermansyah, ST

b. Dewan Pengawas BPFK Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPFK Jakarta belum membentuk Dewan Pengawas dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas.

c. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

1) Kepala Balai

- Nama Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
- Kewajiban :
 - i. Menyiapkan RSB;
 - ii. Menyiapkan RBA;
 - iii. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - iv. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
- Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi :

Perumusan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengendalian mutu dan ketatausahaan.

2) Pejabat Keuangan

- Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Keuangan dan BMN
- Kewajiban :
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - ii. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
 - iii. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - iv. Menyelenggarakan pengelolaan kas; e) Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - v. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU;
 - vi. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - vii. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan program, pengolahan informasi, evaluasi dan laporan, urusan keuangan dan BMN.
- Fungsi :
 - i. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
 - ii. Pelaksanaan pengolahan informasi.
 - iii. Pelaksanaan urusan keuangan.

iv. Pelaksanaan urusan Barang Milik Negara.

3) Pejabat Teknis

- o Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Bimtek dan Mutu

- o Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi pemantapan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

- o Fungsi:

i. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;

ii. Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di wilayah kerja; dan

iii. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.

iv. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

- o Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Pelayanan

- o Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi di bidang pelayanan

- o Fungsi:

i. Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

ii. Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

4) Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Tugas dan kewajiban pejabat pengelola BPFK Jakarta untuk penerapan PK-BLU meliputi Dewan Pengawas, Kepala BPFK Jakarta, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

i. **Kepala BPFK Jakarta**

Menetapkan kebijakan operasional perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal, pengukuran luaran radiasi terapi, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, serta jejaring kerja dan

kemitraan dan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

ii. **Dewan Pengawas**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPFK Jakarta belum membentuk Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset. Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan, serta unsur tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLU. Keanggotaan Dewan Pengawas Kementerian Negara/Lembaga dari unsur pejabat dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dapat berupa keanggotaan *ex-officio* dari jabatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan.

iii. **Satuan Pemeriksa Internal**

o Ikhtisar Jabatan

Satuan Pemeriksa Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern. Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.

o Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLU.

o Kebutuhan jumlah auditor intern dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLU yang membidangi sumber daya manusia.

o Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.

o Auditor intern SPI dapat terdiri atas PNS dan/ atau tenaga profesional non-PNS.

o SPI dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya
2. manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
5. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan

6. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

BAB II. RENCANA KINERJA BPFK JAKARTA

1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2024

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam usaha merealisasikan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja telah mengupayakan melalui analisis kondisi lingkungan. Analisis dilakukan disamping untuk mendapatkan gambaran berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, analisis juga berguna untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian kinerja melalui pemetaan letak (positioning) yang jelas.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Tahun 2023 ini, pemerintah telah menetapkan asumsi makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Asumsi makro ini tentunya turut mempengaruhi kondisi BLU BPFK Jakarta yang memberikan jasa layanan. Adapun asumsi makro untuk tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Adapun asumsi makro untuk tahun 2024

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2024
1	Tingkat Inflasi	1,5 - 3,52 %
2	Tingkat Bunga Deposito	5,3 % - 5,7%
3	Nilai tukar rupiah / Kurs \$ 1	Rp14.800 – Rp 15.400
4	Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR/LIBOR)	6,5 % - 7,5%

Pendapatan yang terus meningkat di lima tahun ke depan juga diasumsikan bahwa tidak adanya inflasi yang cukup signifikan. Asumsi pendapatan tersebut diprediksi meningkat sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi nasional yang dapat menggerakkan industri alat kesehatan dalam negeri (AKD). Selain asumsi makro, faktor lain yang juga mempengaruhi kondisi BLU BPFK Jakarta adalah asumsi mikro. Analisa asumsi mikro di BPFK Jakarta antara lain:

Tabel 7 Analisa asumsi mikro di BPFK Jakarta

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Anggaran Remunerasi Pegawai	Sebesar 27 % dari total anggaran

2	Anggaran Biaya Operasional	Sebesar 26,8 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	Sebesar 40 % dari total anggaran
4	Tarif Pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan	Berdasarkan Unit Cost 100 %
5	Volume pelayanan	Meningkat sebesar 10%
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	Terpenuhi sebesar 100 %
7	Peralatan Kesehatan	Berfungsi sebesar 60 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) BPFK Jakarta menetapkan anggaran remunerasi sebesar 40 % dari total anggaran.
- 2) Subsidi dari Pemerintah berupa anggaran Biaya Operasional perkantoran dan operasional tupoksi diasumsikan sebesar 24 % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional BPFK Jakarta agar pelayanan berjalan maksimal.
- 3) Biaya Investasi diasumsikan sebesar 36 % dari total anggaran belanja dengan rincian 26 % bersumber dari anggaran Rupiah Murni dan 10 % dari anggaran BLU dengan harapan agar kebutuhan, peralatan medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
- 4) Volume pelayanan diasumsikan meningkat 100 % sehingga diharapkan dapat mendapatkan pendapatan dan prevalensi pelayanan pengujian kalibrasi dapat dikendalikan.
- 5) Pemenuhan kebutuhan SDM diasumsikan 100 % terpenuhi diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- 6) Peralatan medik diasumsikan berfungsi sebesar 80 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan serta optimalisasi.

b. Kondisi Internal BLU

Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Pelayanan, Keuangan, Organisasi dan SDM, serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Untuk mendukung layanan BPFK Jakarta dan menjaga mutu layanan maka akreditasi layanan adalah salah satu kekuatan yang harus dicapai. Akreditasi yang telah dicapai antara lain:

- SNI ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi) oleh Komite Akreditasi Nasional

- SNI ISO 17020:2012 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Lembaga Inspeksi) oleh Komite Akreditasi Nasional
- SNI ISO/IEC 17043:2010 (Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Uji Profisiensi) oleh Komite Akreditasi Nasional

Capaian akreditasi ini masih terus ditingkatkan pada tahun 2024 dengan menambah lingkup akreditasi antara lain:

Tabel 8 Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 2023-2024

No.	Jenis layanan	Lembaga Akreditasi	2023	2024
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	KAN	3	-
2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	KAN	2	-
3	Inspeksi Sarana Prasarana	KAN	1	-
4	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	KAN & BAPETEN	-	1
	Pemantauan Dosis perseorangan	KAN	-	1
5	Uji Produk	KAN		5
6	Bimtek (Pelatihan dan Uji Kompetensi)	Dirjen Nakes dan BSNP	1	1
7	Uji Profisiensi	KAN		4

Tahun 2021, BPFK Jakarta sudah mulai membangun sistem Informasi manajemen untuk mendukung layanan BPFK Jakarta yang terintegrasi. Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2023 meliputi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (**SimPEL**), Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**), dan Sistem sistem pelaporan pengujian kalibrasi alat kesehatan (**SIPEKA**) untuk percepatan pelayanan. Sistem informasi manajemen ini untuk mensosialisasi layanan BPFK Jakarta yang belum optimal kepada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan jasa layanan BPFK Jakarta. Terutama industri alkes yang selama ini mengandalkan satu Laboratorium Uji di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, BPFK Jakarta perlu meningkatkan promosi layanannya.

c. Kondisi Eksternal BLU

Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BPFK Jakarta adalah adanya kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk undang – undang ataupun peraturan pemerintah :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan

2. Rencana Kinerja BLU

Semakin disadari bahwa untuk dapat memenangkan persaingan, maka BPFK Jakarta harus dapat memberikan nilai dan kepuasan bagi pelanggan melalui layanan yang berkualitas dengan harga bersaing. Layanan yang berkualitas mempunyai pengaruh yang penting bagi pembentukan kepuasan konsumen. Semakin berkualitas suatu layanan yang diberikan, maka kepuasan pelanggan menjadi semakin tinggi. Pelanggan yang memiliki pengalaman yang baik dan merasa puas terhadap kualitas layanan, dapat memberikan keuntungan karena mereka akan terus menggunakan BPFK Jakarta dan bahkan mungkin merekomendasikan ke konsumen yang lain. Hal ini tentunya berakibat pada peningkatan pendapatan BPFK Jakarta. Sebaliknya tanpa kepuasan, pelanggan akan mudah untuk pindah ke institusi lain, dimana hal ini akan merugikan karena mengurangi pendapatan BPFK Jakarta.

a. Layanan BPFK Jakarta

Target tercapainya kepuasan pelanggan, BPFK Jakarta harus mengikuti perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas sesuai dengan 9 (Sembilan) provinsi wilayah binaan BPFK Jakarta. Layanan BPFK Jakarta diupayakan berjalan secara efektif dan efisien sehingga didapatkan pendapatan yang optimal. Perkembangan teknologi alat kesehatan menjadi penggerak untuk meningkatkan jenis dan jumlah layanan dengan penambahan ruang lingkup layanan pada:

- Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan
- Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi

Layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan ini merupakan layanan yang diharapkan memberikan sumbangan terbesar pertama terhadap pendapatan BPFK Jakarta. Dari data capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan 2025 terlihat bahwa capaian yang dominan diperoleh dari pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan. Dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka peluang masih sangat terbuka terhadap layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sehingga diharapkan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mampu mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 9 Capaian Kinerja Layanan BPFK Jakarta 2022 - 2025

No.	Jenis layanan	Pengguna Layanan	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	RS, PKM, dll.	Alat kesehatan	23800	39690	41580	47520
2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	RS, Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK)	Alat Ukur	720	864	1008	1152
3	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	RS, PKM, dll.	Alat Kesehatan	330	360	380	400
4	Pemantauan Dosis perseorangan	RS, PKM, dll.	Unit	4200	4466	4667	4826
	Uji Produk	Produsen, Perguruan Tinggi, dll.	Alat Kesehatan dan PKRT	48	144	192	240
5	Bimtek (PKL, Magang, Penelitian)	RS, PKM, IPFK, Perguruan Tinggi, dll.	Orang	30	35	40	45
6	Uji Profisiensi	IPFK	Alat Kesehatan dan Alat Ukur	120	160	180	240

Untuk mencapai target layanan tersebut disiapkan sejumlah lingkup layanan baru seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Penambahan Jenis layanan BPFK Jakarta tahun 2023 - 2024

No	Jenis layanan	TAHUN	
		2023	2024
1	Pengujian kalibrasi alkes	Non Contrac Tonometri	Thermometer dahi
		Slit Lamp	Laser
		Snellen Chart	Automatic Chemistry Analyzer
2	Kalibrasi alat ukur standar	Kalibrasi Defibrilator Analyzer	Kalibrasi Sound Level Meter
		Kalibrasi Thermohygrometer	Kalibrasi Lux Meter
3	Inspeksi sarana prasarana	Inspeksi Ruang Isolasi	Audit Energi
4	Uji Kesesuaian X-Ray	Pengukuran Raparan Rasiati Ruang X-Ray Therapy	Angiorphy
			X-Ray Fluoroscopy 9Dual fungsi R/F)

	Pemantauan Dosis Peroangan	TLD Mata	Sewa TLD Badge
		TLD 4 Elemen	Uji keluaran Teraphy
5	Uji Produk Alkes	Timbangan Bayi	Oven
		Infant Warmer	Autoclave
		Bed Electric	Referigerator
		Phototherapy	ECG
6	Uji profisiensi	Bedsite Monitor	Defibrillator
		Fetal Doppler	ECG Simulator
		Autoclave	Ultrasound Therapy
		Thermometer Dahi	
7	Lembaga Sertifikasi Produk	Akreditasi SNI ISO/IEC 17036:2017	Sertifikasi Produk Timbangan Bayi
		Sertifikasi Produk Inkubator Bayi	

Dibukanya layanan baru Sertifikasi Produk berkaitan dengan adanya peraturan dan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri, maka produsen alat kesehatan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi dan penggunaan Logo SNI wajib pada produknya, kondisi ini menjadi peluang BPFK Jakarta untuk menjadi Lembaga sertifikasi Produk alat kesehatan *Pre-Market*.

Selain layanan kalibrasi yang telah menjadi layanan unggulan BPFK Jakarta, rencana pengembangan berikutnya adalah Manajemen pemeliharaan alat kesehatan, salah satunya adalah perbaikan alat kesehatan. BPFK Jakarta akan menyiapkan SDM tersendiri untuk layanan perbaikan ini, yang secara penugasan dan unit kerja terpisah dari layanan kalibrasi alat kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut beberapa langkah akan disiapkan oleh BPFK Jakarta antara lain;

- Pelatihan teknis pemeliharaan alkes
- Kerjasama dengan vendor dan principle alat kesehatan
- Pengadaan *tools* perbaikan alat Kesehatan

Layanan penunjang yang juga akan dilaksanakan adalah optimalisasi asset. Peralatan ukur yang akurat dan tertelusur memberikan peluang untuk layanan penyewaan alat ukur bagi mahasiswa dan peneliti. Layanan yang sudah dimulai dari tahun 2022 dan diharapkan terus berkembang. Selain itu adanya rencana renovasi gedung BPFK Jakarta untuk sarana pelatihan dan menyewakan ruang pertemuan/pelatihan tersebut. Adapun langkah-langkah yang disiapkan BPFK Jakarta antara lain;

- Renovasi aula Pelatihan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan Kursi dan LED untuk pertemuan
- Menjalin kerjasama MoU dengan perguruan tinggi

b. Sumber Daya Manusia

Rancangan kegiatan yang menunjang tercapainya target pendapatan antara lain pengembangan kompetensi SDM BPFK Jakarta untuk semua layanan. Kompetensi pegawai ditingkatkan untuk menjamin kebutuhan mutu dan produktifitas layanan. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Jalur pendidikan dapat diberikan melalui tugas belajar dan izin belajar. Jalur tugas belajar dapat menggunakan anggaran yang besumber pada Rupiah Murni/Pendapatan BLU. Jalur izin belajar dapat diberikan kepada pegawai dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dan anggarannya menggunakan dana pribadi. Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP). Pelatihan yang dibutuhkan SDM BPFK Jakarta menghasilkan

pelaksana yang telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai asesor kompetensi. Personil yang telah tersertifikasi dapat ditugaskan sebagai Pelatih/Instruktur untuk layanan Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Uji Kompetensi Teknisi Elektromedis dan tenaga Kesehatan lainnya.

Bertumbuhnya Institusi pengujian alat kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada tahun 2023 dan adanya gerakan Elektromedik Kompeten (Generik) yang digaungkan oleh Ikatan Elektromedik Indonesia (IKATEMI) menjadi peluang bagi BPFK Jakarta untuk mengembangkan layanan Uji Kompetensi Personil khususnya untuk Tenaga Teknik Elektromedik. Adapun hal yang telah disiapkan BPFK Jakarta sejak tahun 2023 antara lain;

- Telah melaksanakan Pelatihan Asesor Calon Asesi (ACA) yang dilaksanakan bersama BNSP
- Telah memiliki 13 Asesor Kompetensi tersertifikasi BNSP;
- Menyiapkan sarana prasana sebagai tempat Uji Kompetensi;
- Menyusun Kurikulum dan modul pelatihan;
- Mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan;
- Menyiapkan tarif pelaksanaan uji kompetensi yang kompetitif.

Pelatihan teknis yang telah disiapkan pada tahun 2023 dan masih akan dilanjutkan dengan beberapa tambahan lingkup pelatihan baru dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 11 Layanan Pelatihan Teknis di BPFK Jakarta tahun 2023 - 2024

No	Jenis Layanan	Tahun	
		2023	2024
1	Pelatihan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kalibrasi baby incubator 2. Pelatihan Kalibrasi Alkes Medium Risk 3. Uji Kompetensi TEM kalibrasi teknologi menengah 4. Pelatihan Manajemen Resiko Alat Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warmer 2. Kalibrasi EST 3. Pelatihan Kalibrasi UST 4. Kalibrasi Operating Lamp
2	Tempat Uji Kompetensi Personil	Skema Kalibrasi Alkes teknologi Menengah	Skema Kalibrasi Alkes teknologi tinggi

c. Sarana Prasarana

BPFK Jakarta berada pada lokasi strategis dan mudah diakses. Berlokasi di pusat Ibukota Jakarta sangat mudah diakses oleh pengguna jasa layanan BPFK Jakarta. Kepopuleran lokasi BPFK Jakarta juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan BPFK Jakarta sebagai pilihan utama. Dekatnya dengan keramaian juga membuat membuat BPFK Jakarta berpotensi diketahui pelanggan baru sehingga jangkauan akan lebih luas. Dengan

beberapa kemungkinan tersebut akan banyak pelanggan yang terjaring sehingga memberikan efek baik terhadap BPFK Jakarta. Selain lokasi kelengkapan peralatan sesuai persyaratan dan standard dipenuhi secara bertahap. Saat ini peralatan yang dimiliki sudah cukup lengkap dan sesuai standard sedangkan jumlah yang terus ditingkatkan untuk memenuhi target capaian. Peralatan yang sudah dimiliki saat ini dipelihara dan dijamin ketertelusurannya ke satuan internasional. Karena diketahui pelanggan layanan kalibrasi alat ukur standard ada yang berasal dari Malaysia. Kepercayaan dari negara lain untuk mengkalibrasi alat ukurnya di BPFK Jakarta merupakan keberhasilan atas kualitas pelayanan kalibrasi alat ukur standard. Menjaga ketertelusuran alat ukur standard yang dimiliki menjadi satu kegiatan yang wajib dilaksanakan.

d. Indikator Kinerja Utama

Target indikator kinerja utama BPFK Jakarta tahun anggaran 2022 telah diturunkan menjadi target yang diberikan kepada setiap pegawai, sehingga diharapkan dapat mendukung kinerja BPFK Jakarta. Adapun capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 diberikan pada tabel berikut:

Tabel 12 Capaian Indeks Kinerja Utama BPFK Jakarta Tahun 2022

No	Nama Sasaran	Nama Indikator Kinerja		Satuan	2022	
					Target	Realisasi
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Nilai	80	78.27
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jumlah Pelayanan	210	269
		KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Jumlah Lingkup Akreditasi	80	95
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Jumlah	56 SOP	64
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Persentase	90%	100%
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI.6	Persentase Institusi Pengujian fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Persentase	80%	101.25%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Persentase	85%	109.41%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat	40.000	55.192
		KPI.9	Pendapatan PNBPN	Jumlah	9 Milyar	15,1 M
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang	KPI.10	Realisasi Anggaran	Persentase	95%	92.42%

akuntabel					
-----------	--	--	--	--	--

Sedangkan indikator kinerja utama pada tahun 2023 mengalami perubahan karena adanya tambahan akibat perubahan struktur organisasi tata kerja kementerian kesehatan. Sebelumnya BPFK Jakarta menerapkan delapan (8) IKU menjadi empat belas (14) IKU, seperti yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 13 Capaian Indeks Kinerja Utama BPFK Jakarta Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2023
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI. 2	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	85 Ruang Lingkup
	b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	KPI. 3	Jumlah ruang lingkup pelayanan	221 Layanan
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 4	Ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	70%
4	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 5	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	95%
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	KPI. 6	Peningkatan kompetensi pada SDM	85%
6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI. 7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	17,3 M
7	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	1 Layanan
		KPI. 9	Ketepatan waktu pelayanan	80%
		KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	1 Sistem
8	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	KPI.11	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	95%
		KPI.12	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	97%
		KPI.13	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	95%
9	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.14	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	AA

3. Rencana Kinerja Keuangan

Penilaian Kinerja BLU di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Mutu

Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat. Proses penilaian kinerja BLU Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-24/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU bidang layanan kesehatan. Didasarkan atas pertimbangan untuk memudahkan sasaran pengembangan institusi BPFK Jakarta ke depan maka dibutuhkan perubahan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas : Adanya PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi acuan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Proyeksi Pagu Pendapatan BPFK Jakarta dengan menerapkan BLU tahun 2023 - 2024 yang bersumber dari Rupiah Murni setiap tahunnya diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan proyeksi Pagu Pendapatan yang bersumber dari PNBPN ada peningkatan sebesar maksimal 10% setiap tahunnya. Peningkatan produktivitas dan efektifitas pelayanan di BPFK telah meningkatkan pendapatan Pelayanan BPFK Jakarta, terlihat dari capaian pendapatan setiap tahunnya. Tahun 2022 target pendapatan 9 M dapat dilampaui menjadi 15,1 M. Berikut disajikan capaian pendapatan layanan di BPFK Jakarta per unit kerja tahun 2022 – 2023 dan prognosa tahun 2024.

Tabel 14 Capaian Pendapatan Layanan di BPFK Jakarta tahun 2022-2023 dan Prognosa tahun 2024

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	8.383.150.000	8.137.500.000	10.230.000.000
Jasa Uji Kesesuaian X-Ray dan PDP	5.058.759.000	4.019.160.000	4.435.710.000
Jasa Inspeksi Sarana dan Prasarana	433.476.000	2.033.440.000	3.235.556.000
Jasa kalibrasi alat ukur standar	691.113.000	691.200.000	806.400.000
Jasa Uji Profisiensi	193.248.000	180.000.000	240.000.000
Jasa Bimbingan Teknis	47.725.000	38.400.000	56.000.000
Jasa Uji Produk	300.888.000	432.000.000	576.000.000
Pelatihan Teknis	-	201.600.000	472.000.000
LS PRO	-	574.200.000	669.900.000
Tempat Uji Kompetensi	-	480.000.000	720.000.000
Manajemen Pemeliharaan	-	360.000.000	450.000.000
Optimalisasi SDM & Aset	-	240.000.000	300.000.000
Total	15.108.359.000	17.387.500.000	22.191.566.000

Adapun belanja setiap unit layanan di BPFK Jakarta tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024 dikarenakan belanja perjalanan dinas pegawai yang melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi diluar kantor dibebankan ke dalam DIPA. Berikut rincian belanja setiap unit kerja yang melakukan pelayanan di BPFK Jakarta tahun 2022 dan prognosa 2023-2024.

Tabel 15 Rincian Belanja di Unit Kerja Layanan di BPFK Jakarta Tahun 2022 dan Prognosa Tahun 2023 - 2024

No	Unit Kerja layanan	Uraian	Volume Layanan							
			Satuan	Tahun			2024			
				2022	2023	2024				
1	Pengujian dan Kalibrasi Alkes	Biaya Langsung :								
		Biaya Pegawai	13	1.760.700.429	13	1.537.673.000	13	1.599.044.286		
		Biaya Jasa Layanan	13	369.918.699	13	369.918.699	13	369.918.699		
		Biaya Bahan	1	113.471.778	1	1.786.915.667	1	74.325.111		
		Biaya Pemeliharaan	1	275.538.889	1	169.704.000	1	193.997.444		
		Biaya Perjalanan Dinas	13	540.520.111	13	421.985.111	13	632.754.667		
		Jumlah Biaya Langsung		3.060.149.906		1.907.591.699		2.870.040.207		
		Biaya Tidak Langsung :								
		Biaya Administrasi Perkantoran	1	303.762.222	1	446.573.111	1	397.633.111		
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	13	67.088.000	13	61.106.667	13	30.160.000		
Biaya Pemeliharaan	1	109.632.386	1	169.704.000	1	169.704.000				
Biaya Langganan dan Jasa	1	78.944.444	1	69.111.111	1	76.147.778				
Biaya Barang Operasional lainnya	1	83.040.333	1	90.834.222	1	62.787.556				
Jumlah Biaya Tidak Langsung		642.467.386		837.329.111		736.432.444				
Total biaya		3.702.617.292		2.744.920.810		3.606.472.652				
2	Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi	Biaya Langsung :								
		Biaya Pegawai	5	677.192.473	5	591.412.692	5	615.017.033		
		Biaya Jasa Layanan	5	142.276.423	5	142.276.423	5	142.276.423		
		Biaya Bahan	1	43.642.991	1	687.275.256	1	28.586.581		
		Biaya Pemeliharaan	1	105.976.496	1	65.270.769	1	74.614.402		
		Biaya Perjalanan Dinas	5	207.892.350	5	162.301.966	5	243.367.179		
		Jumlah Biaya Langsung		1.176.980.733		1.648.537.107		1.103.861.618		
		Biaya Tidak Langsung :								
		Biaya Administrasi Perkantoran	1	116.831.624	1	171.758.889	1	152935812		

	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	tahun	5	25.803.077	5	23.502.564	5	11.600.000
	Biaya Pemeliharaan pegawai		1	42.166.302	1	65.270.769	1	65.270.769
	Biaya Langganan dan Jasa tahun		1	30.363.248	1	26.581.197	1	29.287.607
	Biaya Barang Operasional lainnya tahun		1	31.938.590	1	34.936.239	1	24.149.060
	Jumlah Biaya Tidak Langsung			247.102.841		322.049.658		283.243.248
	Total biaya			1.424.083.574		1.970.586.765		1.387.104.866
3	Inspeksi Sarana dan Prasarana							
	Biaya Langsung :							
	Biaya Pegawai pegawai		6	812.630.967	6	709.695.231	6	738.020.440
	Biaya Jasa Layanan pegawai		6	170.731.707	6	170.731.707	6	170.731.707
	Biaya Bahan tahun		1	52.371.590	1	824.730.308	1	34.303.897
	Biaya Pemeliharaan tahun		1	127.171.795	1	78.324.923	1	89.537.282
	Biaya Perjalanan Dinas pegawai		6	249.470.821	6	194.762.359	6	292.040.615
	Jumlah Biaya Langsung			1.412.376.879		1.978.244.528		1.324.633.942
	Biaya Tidak Langsung :							
	Biaya Administrasi Perkantoran tahun		1	140.197.949	1	206.110.667	1	183.522.974
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh pegawai		6	30.963.692	6	28.203.077	6	13.920.000
	Biaya Pemeliharaan tahun		1	50.599.563	1	78.324.923	1	78.324.923
	Biaya Langganan dan Jasa tahun		1	36.435.897	1	31.897.436	1	35.145.128
	Biaya Barang Operasional lainnya tahun		1	38.326.308	1	41.923.487	1	28.978.872
	Jumlah Biaya Tidak Langsung			296.523.409		386.459.590		339.891.897
	Total biaya			1.708.900.288		2.364.704.118		1.664.525.839
4	Uji kesesuaian pesawat X							
	Biaya Langsung :							
	Biaya Pegawai pegawai		10	1.354.384.945	10	343.517.778	10	1.230.034.066
	Biaya Jasa Layanan pegawai		10	284.552.846	10	47.005.128	10	284.552.846
	Biaya Bahan tahun		1	87.285.983	1	130.541.538	1	57.173.162
	Biaya Pemeliharaan tahun		1	211.952.991	1	53.162.393	1	149.228.803
	Biaya Perjalanan Biasa pegawai		10	415.784.701	10	69.872.479	10	486.734.359
	Jumlah Biaya Langsung			2.353.961.466		644.099.316		2.207.723.236

	Biaya Perjalanan Biasa	pegawai	4	166.313.880	4	129.841.573	4	194.693.744
	Jumlah Biaya Langsung			941.584.586		1.318.829.685		883.089.294
	Biaya Tidak Langsung :							
	Biaya Administrasi Perkantoran	tahun	1	93.465.299	1	137.407.111	1	122.348.650
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	pegawai	4	20.642.462	4	18.802.051	4	9.280.000
	Biaya Pemeliharaan	tahun	1	33.733.042	1	52.216.615	1	52.216.615
	Biaya Langganan dan Jasa	tahun	1	24.290.598	1	21.264.957	1	23.430.085
	Biaya Barang Operasional lainnya	tahun	1	25.550.872	1	27.948.991	1	19.319.248
	Jumlah Biaya Tidak Langsung			197.682.273		257.639.726		226.594.598
	Total biaya			1.139.266.859		1.576.469.412		1.109.683.893
7	Bimbingan teknis							
	Biaya Langsung :							
	Biaya Pegawai	pegawai	3	406.315.484	3	354.847.615	3	369.010.220
	Biaya Jasa Layanan	pegawai	3	85.365.854	3	85.365.854	3	85.365.854
	Biaya Bahan	tahun	1	26.185.795	1	412.365.154	1	17.151.949
	Biaya Pemeliharaan	tahun	1	63.585.897	1	39.162.462	1	44.768.641
	Biaya Perjalanan Biasa	pegawai	3	124.735.410	3	97.381.179	3	146.020.308
	Jumlah Biaya Langsung			706.188.440		989.122.264		662.316.971
	Biaya Tidak Langsung :							
	Biaya Administrasi Perkantoran	tahun	1	70.098.974	1	103.055.333	1	91.761.487
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	pegawai	3	15.481.846	3	14.101.538	3	6.960.000
	Biaya Pemeliharaan	tahun	1	25.299.781	1	39.162.462	1	39.162.462
	Biaya Langganan dan Jasa	tahun	1	18.217.949	1	15.948.718	1	17.572.564
	Biaya Barang Operasional lainnya	tahun	1	19.163.154	1	20.961.744	1	14.489.436
	Jumlah Biaya Tidak Langsung			148.261.704		193.229.795		169.945.949
	Total biaya			854.450.144		1.182.352.059		832.262.920

Total Target Pendapatan BLU pada tahun 2023 sebesar Rp17.387.500.000,- sedangkan target rencana belanja modal sebesar Rp3.470.000.000,- yang terdiri dari pembelian alat kalibrasi, sedangkan target rencana belanja operasional sebesar Rp6.106.718.000,- yang terdiri dari belanja BMHP, belanja Operasional Kegiatan, belanja gaji dan tunjangan, belanja keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan operasional kantor, pembayaran terkait operasional kantor, pembayaran perjalanan dinas operasional pimpinan, pemeriksaan kesehatan pegawai, serta penambah daya tahan tubuh.

Total target pendapatan dan alokasi Belanja Agregat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16 Pendapatan Belanja Agregat

Kode	Uraian		TA 2022			TA 2023	TA 2024
	Unit/Kode Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target	Realisasi Per 31 Oktober 2022	Prognosis 31 Des 2022	Target 2023	Target 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDAPATAN		9.000.000.000	9.829.965.300	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
A	Pendapatan Jasa Layanan BLU		9.000.000.000	9.829.965.300	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
1	Pendapatan Jasa Layanan BLU		9.000.000.000	9.829.965.300	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
2	Pendapatan Hibah BLU		-	-	-	-	-
3	Pendapatan Kerjasama BLU		-	-	-	-	-
4	Pendapatan BLU Lainnya		-	-	-	-	-
	Pendapatan Jasa Perbankan		-	-	-	-	-
II	BELANJA OPERASIONAL		6.532.567.000	2.989.136.089	4.835.627.051	10.901.690.000	8.773.782.000
A	Belanja Barang BLU		6.532.567.000	2.989.136.089	4.835.627.051	10.901.690.000	8.773.782.000
1	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU		-	-	-	-	-
2	Belanja Barang BLU		6.532.567.000	2.989.136.089	4.835.627.051	3.510.921.000	2.757.754.000
3	Belanja Jasa BLU		-	-	-	334.400.000	113.200.000
4	Belanja Pemeliharaan BLU		-	-	-	478.456.000	-
5	Belanja Perjalanan BLU		-	-	-	5.657.539.000	5.553.200.000
6	Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	-	-	920.374.000	349.628.000
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN/diluar belanja modal		20.304.018.000	13.635.918.456	18.458.146.507	16.951.162.000	17.300.028.000
1	Belanja Pegawai		12.324.903.000	9.446.682.193	11.636.732.558	10.763.711.000	11.193.310.000
2	Belanja Barang		7.979.115.000	4.189.236.263	6.821.413.949	5.295.021.000	5.466.718.000

	3	Belanja Jasa				892.430.000	640.000.000
III	BELANJA MODAL		4.485.565.000	3.569.829.499	4.324.070.116	9.593.141.000	13.479.914.000
	1	Belanja Modal BLU	1.188.251.000	520.548.506	1.103.917.345	6.660.765.000	13.479.914.000
	2	Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	3.297.314.000	3.049.280.993	3.220.152.771	2.932.376.000	-
IV	Surplus/(Defisit (I-II))		2.467.433.000	6.840.829.211	10.272.731.949	6.485.765.000	13.417.784.000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU		-	-	-		
VI	RM/PHLN/PHDN/... (IV+V)		2.467.433.000	6.840.829.211	10.272.731.949	6.485.765.000	13.417.784.000
VII	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... (II.B+III.2)		23.601.332.000	16.685.199.449	21.678.299.278	19.883.538.000	17.300.028.000
VIII	Surplus/(Defisit (I-II) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN/... (VI+VII)		32.601.332.000	26.515.164.749	36.786.658.278	37.270.993.000	39.491.594.000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)		32.601.332.000	26.515.164.749	36.786.658.278	37.270.993.000	39.491.594.000
X	TOTAL ANGGRAN BELANJA (II+III)		11.018.132.000	6.558.965.588	9.159.697.167	20.494.831.000	22.253.696.000

BPFK Jakarta memproyeksikan estimasi saldo akhir tahun 2023 dan saldo awal tahun 2024 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 17 Estimasi Saldo Akhir TA (n-1) dan Saldo Awal TA (n)

URAIAN	REALISASI - PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA		
	2022	2023	2024
Saldo Kas Awal Tahun			
JENIS PENDAPATAN			
Pendapatan Layanan Utama			
Pendapatan Layanan Penunjang			
Pendapatan Lainnya	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
JUMLAH PENDAPATAN PNBPNBP	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
PENDAPATAN RM	0	0	0
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	15.108.359.000	17.387.455.000	22.191.566.000
BELANJA			
BIAYA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai (RM)	11.193.309.939	10.763.711.000	11.193.310.000
Belanja Barang (RM)	13.894.889.685	6.187.451.000	6.106.718.000
Belanja Modal (RM)	4.376.168.116		-

		2.757.376.000	
JUMLAH	29.464.367.740	19.708.538.000	17.300.028.000
Belanja Pegawai (PNBP)	-		
Belanja Barang (PNBP)	6.016.736.991	10.901.690.000	8.711.652.000
Belanja Modal (PNBP)	1.103.917.345	6.660.765.000	13.479.914.000
JUMLAH	7.120.654.336	17.562.455.000	22.191.566.000
JUMLAH TOTAL BELANJA	36.585.022.076	37.270.993.000	39.491.594.000
SURPLUS/DEFISIT sebelum Pendapatan APBN-RM	(21.476.663.076)	(19.883.538.000)	(17.300.028.000)
SURPLUS/DEFISIT dengan Pendapatan APBN-RM	(21.476.663.076)	(19.883.538.000)	(17.300.028.000)

BPFK Jakarta telah merencanakan usulan pembelian alat ukur standard menggunakan dana saldo awal. Pembelian alat ukur standard untuk menunjang kebutuhan layanan yang telah direncanakan untuk tahun 2024.

Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan beban layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh satker BLU. Beban ini antara lain adalah biaya penyusutan dan biaya dibayar di muka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja

No	Unit Kerja layanan	Uraian	2024
1	Pengujian dan Kalibrasi Alkes	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	1.599.044.286
		Biaya Jasa Layanan	369.918.699
		Biaya Bahan	74.325.111
		Biaya Pemeliharaan	193.997.444
		Biaya Perjalanan Dinas	632.754.667
		Jumlah Biaya Langsung	2.870.040.207
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	397.633.111
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	30.160.000
		Biaya Pemeliharaan	169.704.000
		Biaya Langganan dan Jasa	76.147.778
		Biaya Barang Operasional lainnya	62.787.556
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	736.432.444
	Total biaya		

			3.606.472.652
2	Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	615.017.033
		Biaya Jasa Layanan	142.276.423
		Biaya Bahan	28.586.581
		Biaya Pemeliharaan	74.614.402
		Biaya Perjalanan Dinas	243.367.179
		Jumlah Biaya Langsung	1.103.861.618
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	152935812
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11.600.000
		Biaya Pemeliharaan	65.270.769
		Biaya Langganan dan Jasa	29.287.607
		Biaya Barang Operasional lainnya	24.149.060
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	283.243.248
	Total biaya		1.387.104.866
3	Inspeksi Sarana dan Prasarana	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	738.020.440
		Biaya Jasa Layanan	170.731.707
		Biaya Bahan	34.303.897
		Biaya Pemeliharaan	89.537.282
		Biaya Perjalanan Dinas	292.040.615
		Jumlah Biaya Langsung	1.324.633.942
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	183.522.974
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	13.920.000
		Biaya Pemeliharaan	78.324.923
		Biaya Langganan dan Jasa	35.145.128
		Biaya Barang Operasional lainnya	28.978.872
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	339.891.897
	Total biaya		1.664.525.839
4	Uji kesesuaian pesawat X	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	1.230.034.066
		Biaya Jasa Layanan	284.552.846
		Biaya Bahan	57.173.162
		Biaya Pemeliharaan	149.228.803
		Biaya Perjalanan Biasa	486.734.359
		Jumlah Biaya Langsung	2.207.723.236
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	305871623,9

		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	23200000
		Biaya Pemeliharaan	130541538,5
		Biaya Langganan dan Jasa	58575213,68
		Biaya Barang Operasional lainnya	48298119,66
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	566.486.496
	Total biaya		2.774.209.732
5	Pemantauan Dosis perseorangan	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	1.107.030.659
		Biaya Jasa Layanan	256.097.561
		Biaya Bahan	51.455.846
		Biaya Pemeliharaan	134.305.923
		Biaya Perjalanan Biasa	438.060.923
		Jumlah Biaya Langsung	1.986.950.913
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	275.284.462
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	20.880.000
		Biaya Pemeliharaan	117.487.385
		Biaya Langganan dan Jasa	52.717.692
		Biaya Barang Operasional lainnya	43.468.308
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	509.837.846
	Total biaya		2.496.788.759
6	Uji Produk	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	492.013.626
		Biaya Jasa Layanan	113.821.138
		Biaya Bahan	22.869.265
		Biaya Pemeliharaan	59.691.521
		Biaya Perjalanan Biasa	194.693.744
		Jumlah Biaya Langsung	883.089.294
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	122.348.650
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	9.280.000
		Biaya Pemeliharaan	52.216.615
		Biaya Langganan dan Jasa	23.430.085
		Biaya Barang Operasional lainnya	19.319.248
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	226.594.598
	Total biaya		1.109.683.893

7	Bimbingan teknis	Biaya Langsung :	
		Biaya Pegawai	369.010.220
		Biaya Jasa Layanan	85.365.854
		Biaya Bahan	17.151.949
		Biaya Pemeliharaan	44.768.641
		Biaya Perjalanan Biasa	146.020.308
		Jumlah Biaya Langsung	662.316.971
		Biaya Tidak Langsung :	
		Biaya Administrasi Perkantoran	91.761.487
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	6.960.000
		Biaya Pemeliharaan	39.162.462
		Biaya Langganan dan Jasa	17.572.564
		Biaya Barang Operasional lainnya	14.489.436
		Jumlah Biaya Tidak Langsung	169.945.949
		Total biaya	832.262.920

Perkiraan maju Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta 2 Tahun kedepan untuk belanja volume masing-masing output beserta perkiraan maju 2 tahun kedepan untuk target pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19 Prakiraan Maju Pendapatan dan belanja

Tahun	Pagu Belanja BLU	Pagu Pendapatan BLU
TA 2021	6,867,200,000	8,000,000,000
TA 2022	7,296,400,000	8,500,000,000
TA 2023	17,387,500,000	17,387,500,000
TA 2024	20.493.530.000	20.493.530.000

Tabel 20 Rencana Kebutuhan RM

Total Belanja RM	2022	2023	2024
		23,601,332,000	20,670,429,000
Belanja Pegawai	12,324,903,000	10,763,711,000	12,572,082,000
Belanja Barang	7,979,115,000	6,436,718,000	9,839,809,000
Belanja Modal	3,297,314,000	3,470,000,000	23,794,767,000

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran Fleksibel (*Flexible budget*) yaitu Belanja Badan Layanan Umum dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi

penerimaan Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam satu angka prosentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).

Dalam menghitung ambang batas belanja maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan dan target anggaran pada tahun anggaran yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi anggaran tahun anggaran yang lalu, dimana pagu belanja selalu berada dibawah angka realisasi penerimaan dan angka target maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mengajukan ambang batas belanja menyesuaikan dengan kebutuhan antara 10%.

Berdasarkan laporan keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 21 Ambang Batas Belanja

No	Uraian	2022	Prognosa 2023	Prognosa 2024
1	Target Pendapatan	9,000,000,000	17,387,500,000	22,191,566,000
2	Pagu Belanja	7,725,600,000	17,387,500,000	22,191,566,000
3	Realisasi Penerimaan	15,108,359,000	20,000,000,000	24,000,000,000
4	Prosentase Realisasi	167.87%	115.03%	108.15%
5	Realisasi Belanja	7,120,654,336	16,400,000,000	20,880,000,000
6	Prosentase Belanja	92.17%	94.32%	94.09%
7	Ambang Batas	10%	10%	10%

4. Informasi lainnya

Kemampuan memperoleh, mengelola dan mengembangkan dana mandiri dengan cara mengurangi ketergantungan pada dana APBN. Pengurangan ketergantungan ini dapat dilakukan melalui pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan dan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan BPFK. Selain itu efisiensi penggunaan dana melalui pengendalian internal yang baik, resource sharing, manajemen asset yang baik, dan penerapan secara baik anggaran berbasis kinerja juga menjadi target yang harus dicapai.

a. Rencana Inovasi

Dengan adanya isu -isu strategis tersebut, BPFK Jakarta mengupayakan layanan inovasi untuk meningkatkan produktifitas selain melakukan pelayanan sesuai dengan TUPOKSI nya, BPFK Jakarta mengembangkan inovasi layanan baru. Adapun Inovasi layanan baru diluar tupoksi disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 22 Layanan Inovasi BPFK Jakarta diluar tupoksi

No.	Jenis layanan	Pengguna Layanan	Satuan	Tahun	
				2023	2024
1.	Manajemen Pemeliharaan Alkes	RS, PKM, dll.	Alat Kesehatan	10	17
2.	Optimalisasi Aset	RS, PKM, dll.	Sarpras, SDM	5	15

Rencana pengembangan sumberdaya yang dimiliki adalah Manajemen pemeliharaan alat kesehatan, salah satunya adalah perbaikan alat kesehatan. BPFK Jakarta akan menyiapkan SDM tersendiri untuk layanan perbaikan ini, yang secara penugasan dan unit kerja terpisah dari layanan kalibrasi alat kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut beberapa langkah akan disiapkan oleh BPFK Jakarta antara lain;

- Pelatihan teknis pemeliharaan alkes
- Kerjasama dengan vendor dan principle alat kesehatan
- Pengadaan tools perbaikan alat Kesehatan

Aset peralatan ukur yang akurat dan tertelusur memberikan peluang untuk layanan penyewaan alat ukur bagi mahasiswa dan peneliti. Layanan yang sudah dimulai dari tahun 2022 dan diharapkan terus berkembang. Selain itu adanya rencana renovasi gedung BPFK Jakarta untuk sarana pelatihan dan menyewakan ruang pertemuan/pelatihan tersebut. Adapun langkah-langkah yang disiapkan BPFK Jakarta antara lain;

- Renovasi aula Pelatihan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan Kursi dan LED untuk pertemuan
- Menjalin kerjasama MoU dengan perguruan tinggi

b. Rencana Penetapan/Perubahan Tarif

BPFK Jakarta merupakan satker BLU baru yang sedang mengusulkan penetapan dan perubahan tarif layanan. Tarif layanan yang diterapkan saat ini masih menggunakan tarif PNBSP sesuai PP 64 tahun 2019. Usulan tarif merupakan sejumlah layanan yang sudah mampu dilaksanakan oleh BPFK Jakarta namun belum memiliki tarif. Terdapat juga usulan perubahan tarif akibat adanya

kenaikan harga alat ukur standard, bahan habis pakai, perubahan parameter ukur dan beberapa faktor lainnya. Usulan tarif ini diharapkan disetujui oleh Kementerian Keuangan karena tarif yang diusulkan masih dibawah harga kompetitor BPFK Jakarta.

c. Isu-isu strategis bidang keuangan yang akan mempengaruhi capaian kinerja BPFK Jakarta antara lain:

- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi komputerisasi, sistem pengendalian internal yang baik, audit dari pihak eksternal yang independen.
- Fleksibilitas dan kecepatan pengelolaan keuangan;
- Mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada peraturan yang berlaku;
- Mengoptimalkan kemandirian keuangan yang dilakukan melalui pengembangan unit bisnis yang ada di BPFK.

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja pelayanan BPFK Jakarta tahun 2022 mencapai 137,98%, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai sebesar 167,87%.
2. Realisasi belanja/penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 91,06 %.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta tahun 2023 akan melaksanakan program strategis dari jasa layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, pelatihan teknis, penyelenggara uji profisiensi antar laboratorium dan pendapatan dari usaha lainnya, meliputi jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Uji Kesesuaian X-Ray, Inspeksi Sarana Prasarana, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pelatihan Teknis, Uji Profisiensi, Uji Produk Alat Kesehatan, dan Pemantauan Dosis Perseorangan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
4. RBA BPFK Jakarta untuk tahun 2023, diproyeksikan penilaian kinerja BLU dengan total score sebesar 85,28 dan tingkat kinerja AA.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta disusun berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.057.929.000,- berasal dari: Belanja Pegawai : Rp10.763.711.000,- Belanja Barang : Rp17.357.678.000,- Belanja Modal : Rp9.936.540.000,-
6. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2024 adalah :
 - a. Meningkatkan promosi layanan BPFK Jakarta
 - b. Merancang pola tarif baru yang kompetitif
 - c. Efisiensi dan efektifitas kegiatan layanan
 - d. Melakukan Inovasi terhadap layanan BPFK Jakarta
 - e. Optimalisasi pengelolaan piutang
 - f. Menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, SNI ISO/IEC 17043, dan Standar Sertifikasi lainnya yang mendukung Visi dan Misi BPFK Jakarta; Meningkatkan jenis dan volume layanan dengan menambah ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi SPA;
 - g. Menjadi Pusat Pelatihan dan Sertifikasi SDM di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
 - h. Menjadi Penyelenggara Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium untuk lingkup kalibrasi, pengujian, dan inspeksi;

- i. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (SimPEL BPFKJ) untuk percepatan pelayanan;
 - j. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
 - k. Perluasan layanan kalibrasi alat ukur standar pada lingkup industri alat kesehatan dan non alat kesehatan;
 - l. Pelayanan uji prototipe alat kesehatan dari industri, lembaga riset, dan universitas;
 - m. Tata kelola bidang keuangan yang sistematis dan akuntabel
 - d. Anggaran Investasi peralatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp9.703.955.000,- bersumber dari BLU dan Rp6.233.955.000,- digunakan untuk keperluan pembelian alat kalibrasi yang menunjang peningkatan pendapatan BPFK Jakarta. Anggaran investasi untuk renovasi Gedung operasional layanan diproyeksikan sebesar Rp3.470.000.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni.
 - e. Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2023 meliputi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (**SimPEL**), Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**), dan Sistem sistem pelaporan pengujian kalibrasi alat kesehatan (**SIPEKA**) untuk percepatan pelayanan
 - f. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.
7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
- a. Persaingan yang ketat antar institusi pengujian kalibrasi alat, baik pemerintah maupun swasta karena semakin bertambah dan berkembangnya institusi pesaing swasta lebih agresif dan fleksibel dalam sistem marketing.
 - b. Formasi SDM teknis terbatas sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas ke fasyankes.
 - c. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan ke BPFK Jakarta untuk belanja modal terutama pengadaan alat kalibrasi, karena sebagai penunjang pelayanan ke faskes binaan tidak optimal.
8. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut manajemen BPFK Jakarta menetapkan upaya sebagai berikut:
- a. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.
 - b. Mengadakan Formasi kebutuhan SDM teknis melalui bagian kepegawaian.

- c. Melakukan revisi anggaran atau pergeseran anggaran dari belanja barang ke belanja modal dan berkoordinasi dengan eselon I terkait alokasi dana PEN untuk alokasi belanja modal.

B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Saving pendanaan untuk Kegiatan/Aktivitas Pengembangan Pada Rencana Strategi Bisnis BPFK Jakarta, terdapat Program Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan baik Layanan Umum maupun Layanan Unggulan. Di tahun 2023 direncanakan pengembangan aplikasi layanan yang terintegrasi untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan secara tepat dan cepat. Kemudian untuk belanja operasional dan belanja bahan meningkat dikarenakan adanya penambahan layanan baru. Mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah berupa dukungan bantuan Rupiah Murni semakin terbatas sehingga untuk dapat memastikan bahwa pengembangan dan belanja operasional tersebut berjalan maka BPFK Jakarta harus melakukan saving pendanaan untuk kegiatan/aktivitas tersebut.
2. Rencana Kerjasama
 - a. Perluasan kerjasama dalam hal pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan yang dilakukan sebagai upaya optimalisasi aset BPFK Jakarta.
 - b. Kerjasama Manajemen dengan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
 - c. Kerjasama dengan pihak Perbankan dalam program peningkatan pelayanan.
3. Perubahan Tarif disesuaikan dengan kenaikan harga bahan habis pakai dan beban operasional.
4. Perubahan Remunerasi menyesuaikan dengan peningkatan target pendapatan. Rencana penambahan pegawai baik dari ASN ataupun dari P3K menyesuaikan dengan beban kerja di masing-masing instalasi
5. Rencana Kerjasama dengan pihak ketiga Untuk meningkatkan pendapatan operasional BPFK Jakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.